INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air serta pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong royong masyarakat Indonesia perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/80-1983/84;
11. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1979/1980 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

INDONESIA
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1979
TANGGAL 28 Mei 1979.

PEDOMAN PELAKSANA
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1979/1980

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial desa.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPENAS bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II JUMLAH BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam tahun anggaran 1979/1980 disediakan bantuan sebesar Rp.31.025.000.000.-
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
 - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp.450.000,
 - b. Bantuan keserasian untuk :
 1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam wilayah kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
 2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa;
 - c. Bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa;
 - d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat kecamatan.
- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

BAB III PENYEDIAAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas:
 - a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II;
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas :
 - a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing kecamatan;
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat desa bertanggungjawab atas :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Pemeliharaan Prasarana yang telah dibangun.

Pasal 7

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa;
- b. Usaha Pemerintah Daerah menggali dana dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa;
- c. Usaha swadaya gotong royong masyarakat desa yang lain.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPENAS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO